

10 TAHUN POLITIK INDONESIA: ESKALASI GANGGUAN INFORMASI POLITIK DAN STRATEGI MENGHADAPINYA DI ERA DIGITAL

A DECADE OF INDONESIAN POLITICS: THE ESCALATION OF POLITICAL INFORMATION DISORDER AND STRATEGIES TO ADDRESS IT IN THE DIGITAL ERA

Hasbullah Azis¹, Esfandani Peni Indreswari², Oktavia Rizky Karunia Ramadhani³

^{1,2,3}Universitas Sahid Surakarta

Jl. Adisucipto No.154, Kota Surakarta, Indonesia

¹hasbullah.azis@usahidsolo.ac.id; ²esfandani@usahidsolo.ac.id; ³oktaviarizky05@gmail.com

Diterima tgl. 4 September 2025 Direvisi tgl. 30 Desember 2025 Disetujui tgl.
31 Desember 2025

ABSTRACT

Over the past decade (2014–2024), Indonesia has experienced a significant escalation of information disorder, posing serious risks to democratic institutions and increasing the potential for social conflict. Employing a literature review approach, this study aims to analyze the dynamics of political information disorder in Indonesia and to evaluate existing mitigation strategies. The study examines 65 selected documents, including journal articles, books, survey reports, and policy regulations. Thematic analysis reveals that the dissemination of political information disorder in Indonesia has intensified markedly and has evolved into a systematic and organized operation, particularly during electoral periods. This ecosystem does not emerge spontaneously; rather, it involves a wide range of actors, from individual sympathizers to cyber troops and buzzers, driven by economic, political, social, and ideological motives. These challenges are further exacerbated by the emergence of artificial intelligence (AI) technologies and deepfakes, which significantly increase the complexity of information disorder. Various countermeasures have been implemented, such as digital literacy initiatives, collaborative fact-checking, and law enforcement and regulatory interventions; however, these efforts still require critical evaluation. A more comprehensive strategy is therefore needed, encompassing the strengthening of digital literacy, the deployment of verification technologies, proportionate regulatory frameworks, and cross-sectoral collaboration to safeguard the integrity of Indonesian democracy in the era of artificial intelligence.

Keywords: *information disorder, political disinformation, election hoax, digital literacy, Indonesia democracy*

ABSTRAK

Dalam satu dekade terakhir (2014-2024), Indonesia telah mengalami eskalasi gangguan informasi yang signifikan. Hal ini berpotensi menggerus tatanan demokrasi dan memicu konflik sosial. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika gangguan informasi politik Indonesia serta mengevaluasi strategi dalam mitigasi gangguan informasi. Penelitian ini mengkaji 65 dokumen terpilih yang mencakup artikel jurnal, buku, laporan survei, dan regulasi kebijakan. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa penyebaran gangguan informasi politik di Indonesia telah mengalami eskalasi intensitas yang signifikan dan bertransformasi menjadi sebuah operasi yang sistematis dan terorganisir, khususnya pada momen electoral. Ekosistem ini tidak terjadi begitu saja, ia melibatkan berbagai aktor, mulai dari simpatisan individu hingga pasukan siber (*cyber troops*) dan pendengung (*buzzer*), yang didorong oleh motif ekonomi, politik, sosial, dan ideologi. Situasi ini semakin menantang oleh kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *deep fake* yang meningkatkan kompleksitas gangguan informasi. Berbagai strategi penanganan sudah dilakukan seperti literasi digital, kolaborasi cek fakta, dan penegakan hukum dan regulasi, namun tampaknya masih memerlukan evaluasi. Diperlukan strategi komprehensif melalui penguatan literasi digital, pemanfaatan teknologi verifikasi, regulasi yang proporsional, serta kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas demokrasi Indonesia di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *gangguan informasi, disinformasi politik, hoaks pemilu, literasi digital, demokrasi indonesia*

1. PENDAHULUAN

Indonesia mengalami eskalasi gangguan informasi (*information disorder*) yang signifikan terutama dalam ranah politik dalam satu dekade terakhir. Gangguan informasi adalah istilah yang merepresentasikan informasi atau berita palsu / tidak benar yang digunakan (produksi dan distribusi) untuk menyakiti atau menyerang seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap seseorang, lembaga, atau kelompok sosial (Son & Rashid, 2021, pp. 3–4). Gangguan informasi yang mencakup misinformasi (informasi salah yang disebarkan secara tidak sengaja), disinformasi (informasi palsu yang disebarkan secara sengaja untuk merugikan), dan malinformasi (informasi benar namun disebarkan untuk merugikan/menyerang) (Wardle & Derakhshan, 2019) telah dan sedang memengaruhi berbagai dinamika politik global seperti referendum Brexit di Inggris (Parnell, 2023), pemilihan presiden Amerika Serikat 2016-2024 (Dickson, 2024), serta fenomena penyebaran disinformasi daring yang terorganisir yang terjadi di Kawasan Asia Selatan dan Tenggara (Galpaya & Bandaranayake, 2022). Berbagai *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter (kini X), dan Youtube dinilai sebagai medium utama dalam mengamplifikasi berbagai konten manipulatif yang dibantu oleh algoritma, bot, hingga tim kampanye yang terkoordinasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa para aktor politik baik nasional maupun lokal telah memanfaatkan ekosistem media sosial untuk menyebarkan informasi palsu demi kepentingan elektoral dan ideologis (Kaur & Nair, 2018; Kwok, 2018).

Dalam konteks terkini, gangguan informasi tidak hanya diproduksi dan didistribusikan secara manual oleh manusia, namun semakin berkembang pesat dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Teknologi seperti *generative AI* (*deep fake*, *voice cloning*, dan *language models*), telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran disinformasi dengan tingkat keakuratan dan kecepatan yang tinggi. Dalam teknologi *generative AI*, seseorang bisa menciptakan sebuah video pernyataan palsu seorang tokoh politik dengan *deep fake* yang menghasilkan konten fabrikasi yang sulit diverifikasi oleh masyarakat umum terutama yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Selain itu, *chatbot* dan akun otomatis berbasis AI yang mampu menyebarkan narasi politik secara masif dan terorganisasi, dinilai dapat mengganggu wacana publik yang sehat.

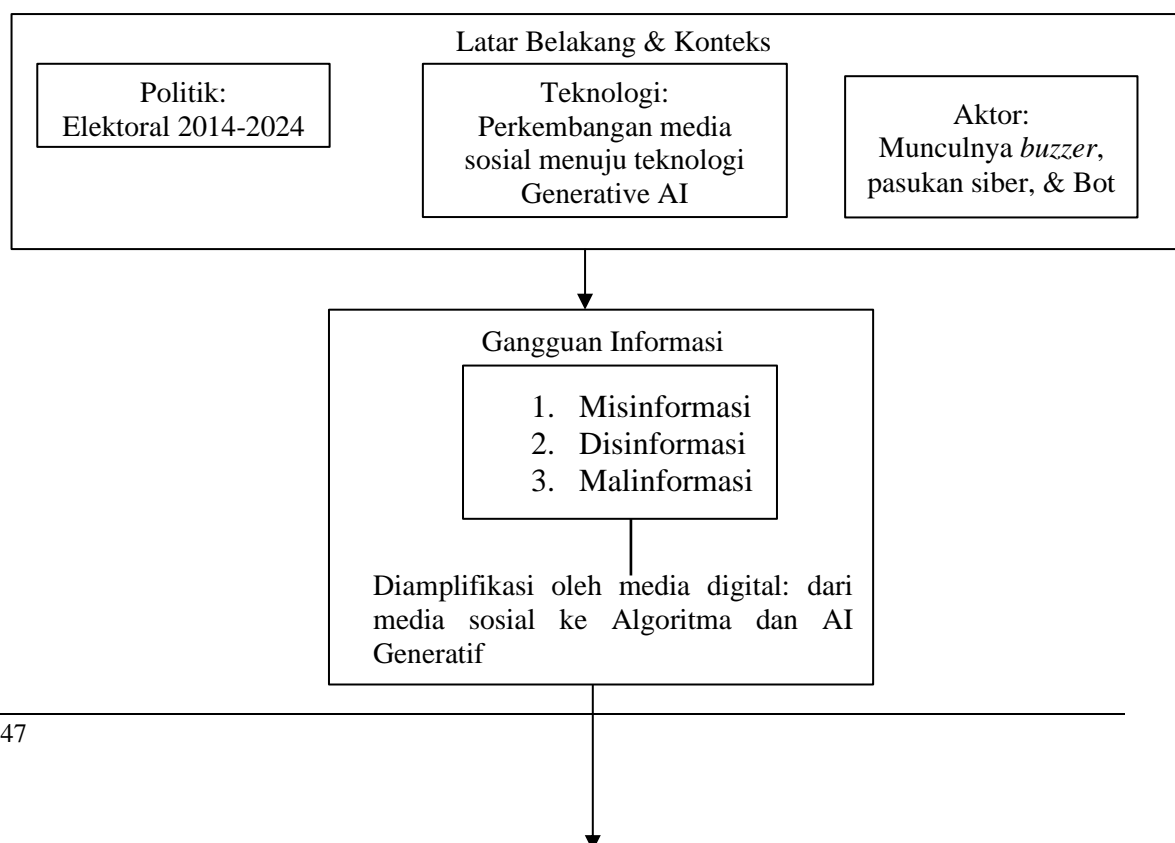
Kajian tentang gangguan informasi dan politik digital dalam demokrasi Indonesia sudah mulai mendapatkan perhatian dan telah mengalami kemajuan dengan berbagai aspek dan dimensi kajian. Beberapa penelitian telah mencermati secara kompleks perkembangan lanskap disinformasi mulai dari pola perkembangan gangguan informasi politik, pola dan strategi pelaku penyebaran dan dampaknya terhadap polarisasi politik pada Pilkada 2012 dan Pemilu 2014, 2019 (Masduki, 2021; Okthariza, 2024; Sri Saraswati, 2021). Ada yang menyelidiki terkait aktor dan klasifikasi gangguan informasi politik serta motivasi apa yang mendorong mereka menyebarkan berita palsu (Kajimoto et al., 2018). Selain itu, penelitian lain mencermati faktor apa yang mendorong masyarakat dalam mempercayai berita-berita palsu (Parahita, 2019).

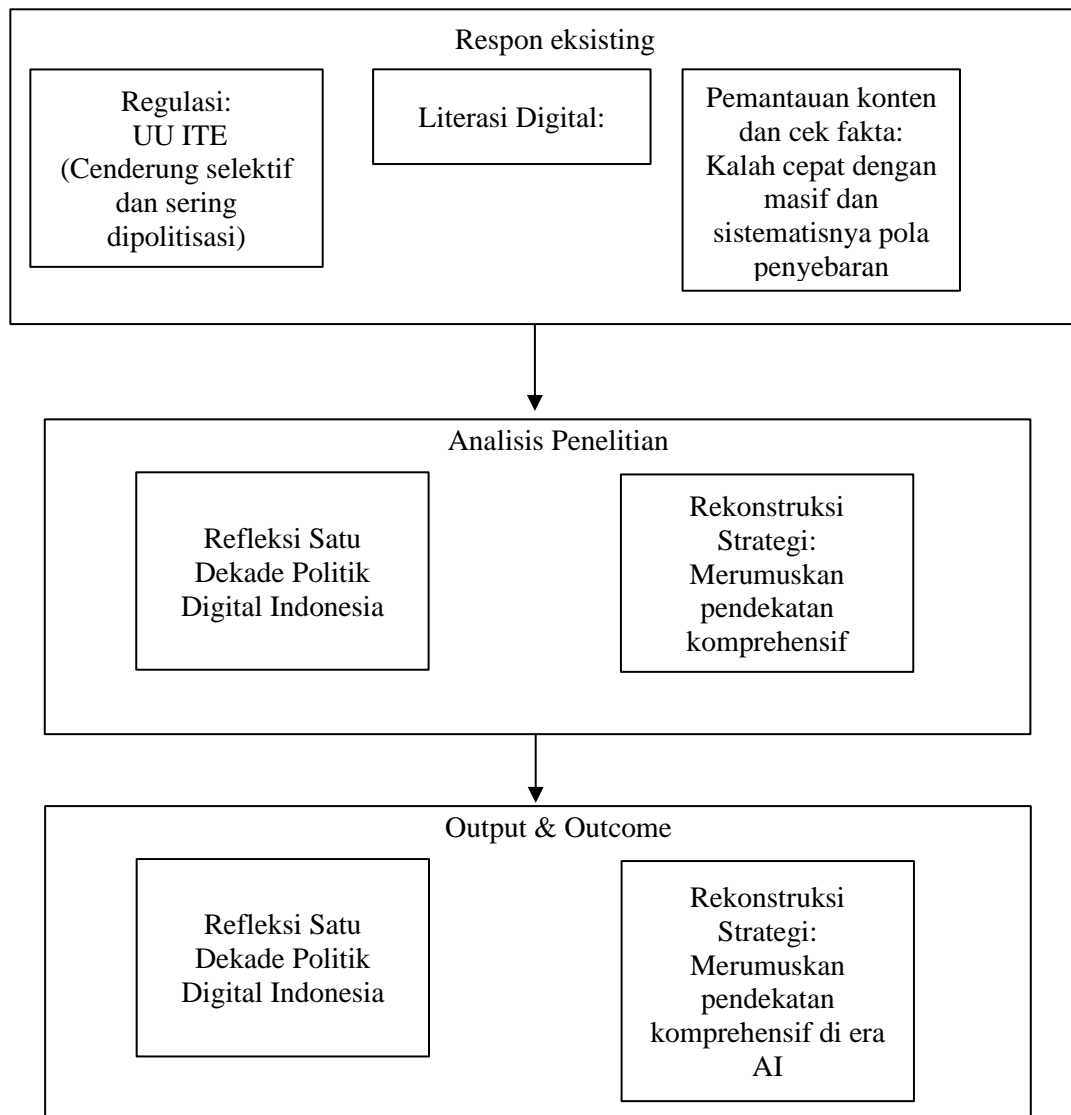
Mengenai strategi penanggulangan gangguan informasi di Indonesia, beberapa penelitian telah menemukan beberapa strategi misalnya bagaimana peningkatan literasi media dinilai efektif dalam menangkal berbagai informasi palsu (Muannas & Mansyur, 2020). Lalu ada kampanye di media sosial, deklarasi antihoaks, peningkatan kesadaran publik dan pengumuman kepada Masyarakat (Naryoso et al., 2021). Ada juga yang melakukan pendekatan *crowdsourcing* dengan memanfaatkan partisipasi sukarelawan (Corsi et al., 2024) dan penggunaan berbagai aplikasi (Nurlatifah, 2019) untuk menangkal informasi palsu. Selain itu, pembuatan kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dinilai sebagai salah strategi yang efektif dalam mengatasi berita palsu (Budiman, 2024) meskipun strategi ini

tampaknya dinilai belum efektif dan berkelanjutan disamping banyak catatan dari regulasi yang telah dibuat seperti penegakan yang masih selektif dan sering dipolitisasi hingga pengekanan kebebasan berpendapat (Ferdiansyah et al., 2025, p. 925; Ferdinal & Astuti, 2023, pp. 88–89; Krisetya, 2025).

Meskipun studi-studi yang sudah dihasilkan ini telah berkontribusi pada pemahaman yang berkembang tentang gangguan informasi dalam lanskap politik Indonesia. Namun, kajian tersebut belum melacak perkembangan gangguan informasi politik di Indonesia selama satu dekade terakhir dimana penelitian yang sudah dilakukan lebih banyak berfokus pada Pemilu 2014-2019 dan Pilkada 2012 tapi belum mencermati dan menganalisis terkait dinamika gangguan informasi pada Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Isu-isu yang berkaitan dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI) juga belum banyak menjadi fokus penelitian terkait strategi melawan gangguan informasi politik di Indonesia. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan hanya mencermati satu jenis gangguan informasi. Tampaknya belum ada penelitian yang komprehensif yang membahas tiga dimensi gangguan informasi (misinformasi, disinformasi, dan malinformasi) dalam konteks politik di Indonesia.

Oleh karena itu, perlunya refleksi, evaluasi, dan perumusan strategi yang komprehensif dalam menangani gangguan informasi politik di Indonesia, terutama menjelang pemilihan di masa depan. Tanpa upaya yang sistematis, gangguan informasi dapat semakin merusak tatanan demokrasi, menciptakan konflik sosial, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memaparkan dan merefleksikan dinamika gangguan informasi politik dalam satu dekade terakhir serta menawarkan pendekatan analitis terhadap berbagai strategi-strategi yang telah, sedang, dan seharusnya dilakukan untuk menjawab tantangan gangguan informasi politik di Indonesia kedepan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam membangun ekosistem komunikasi politik yang lebih sehat dan demokratis di masa depan terutama di era kecerdasan buatan yang semakin menantang. Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian yang diupayakan penulis untuk mendeskripsikan fenomena gangguan informasi politik Indonesia dalam satu dekade terakhir (2014-2024) sekaligus berupaya merumuskan strategi mitigasi gangguan informasi politik khususnya di era *artificial interlligence*.





Adapun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

1. Bagaimana fenomena gangguan informasi politik yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir (2014-2024)?
2. Strategi apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh para *stakeholder* (Pemerintah, media, jurnalis, dan LSM) dalam menghadapi berbagai macam gangguan informasi politik yang terjadi di Indonesia pada 2014-2024?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis atau digital untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik atau fenomena tertentu. Menurut Creswell, 2017, studi literatur adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dokumen yang

relevan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dan mendukung interpretasi data. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena gangguan informasi politik di Indonesia selama satu dekade terakhir (2014-2024) serta strategi-strategi yang digunakan untuk menanganinya. Studi literatur dinilai relevan dalam menelaah transformasi gangguan informasi khususnya dalam politik Indonesia, mengingat kompleksitas distribusi, produksi, konten, aktor, hingga media yang digunakan dalam penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian (Son & Rashid, 2021; Wardle & Derakhshan, 2019).

Berdasarkan proses penelusuran awal, diperoleh kurang lebih 120 dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Setelah melalui tahap seleksi dan kurasi menggunakan Teknik *purposive sampling*, sebanyak 65 dokumen ditetapkan sebagai unit analisis utama dalam penelitian ini. Dokumen tersebut terdiri atas:

- a) 32 artikel jurnal ilmiah.
 - Jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
 - Fokus pada misinformasi, disinformasi, malinformasi, komunikasi politik, dan media digital
- b) 18 laporan riset dan survey
 - Laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Masyarakat Telematik (Mastel) Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Koalisi Cek Fakta
- c) 9 dokumen kebijakan dan regulasi
 - Undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan Kominfo/Komdigi
 - Dokumen resmi KPU terkait pemilu dan pilkada
- d) 6 laporan pemeriksaan fakta dan laporan organisasi masyarakat sipil.
 - Laporan tematik pemeriksa fakta

Table 1. Unit Analisis dan Sumber Data Penelitian

No	Jenis Dokumen	Jumlah	Sumber Data Utama	Kegunaan Dalam Analisis
1	Artikel Jurnal	32	Jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional	Mengkaji konsep, teori, tipologi gangguan informasi, aktor, dan dinamika gangguan informasi politik
2	Laporan riset dan survei	18	Laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Masyarakat Telematik (Mastel) Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Koalisi Cek Fakta, Safer Internet Lab. CSIS.	Mengidentifikasi tren empiris, eskalasi hoaks, pola sebaran, dan karakter konten gangguan informasi
3	Dokumen kebijakan dan regulasi	9	Undang-Undang ITE, Peraturan KPU, dokumen Komdigi, dan Bawaslu	Menganalisis kerangka regulasi dan kebijakan penanganan gangguan informasi politik
4	Laporan pemeriksaan fakta & dokumen lainnya	6	Mafindo, Cekfakta.com, AJI, Asosiasi Masyarakat Siber Indonesia (AMSI), dan platform media online	Mengkaji bentuk konten hoaks, narasi dominan, dan praktik penanganan di tingkat operasional

Total	Unit Analisis	65
		Dokumen

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Pengorganisasian data berdasarkan jenis dan sumber dokumen
- b) Pengkodean awal untuk mengidentifikasi persoalan atau isu-isu yang menjadi fokus penelitian
- c) Pengelompokan tema penelitian yang mencakup jenis gangguan informasi politik, bentuk dan karakter konten, pola dan mekanisme penyebaran, aktor yang terlibat, media atau platform distribusi, dan motif produksi serta distribusi gangguan informasi politik di Indonesia.
- d) Analisis interpretatif terhadap strategi penanganan gangguan informasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat sipil.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Peneliti melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber dan jenis publikasi yang kredibel dan relevan, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen dengan tahun publikasi antara 2014 hingga 2024 agar sesuai dengan batasan waktu dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif dan meminimalisir potensi bias dari sumber tunggal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eskalasi Gangguan Informasi Politik Indonesia (2014-2024)

Maraknya penyebaran informasi yang mengandung berbagai gangguan informasi (mis-disinformasi dan malinformasi) dengan berbagai bentuknya telah menjadi persoalan global tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, awal peningkatan penyebaran gangguan informasi terutama mis-disinformasi (yang meliputi hoaks dan berita palsu) mulai terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Pada periode ini, media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi palsu disamping masih rendahnya kemampuan berpikir kritis di masyarakat terhadap berbagai konten yang tersebar di internet (Monggilo, 2023; Rahmadhany et al., 2021). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan bahwa pada masa pemilihan presiden 2014 informasi palsu yang tersebar lebih banyak pemutarbalikan fakta atau informasi (ELSAM, 2017) dimana narasi yang dibangun lebih banyak menyerang dan bertujuan merusak reputasi kandidat atau lawan politik sehingga informasi palsu yang disebarkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap kandidat tertentu (Saptoyo & Galih, 2022a; Wedhaswary, 2023a).

Pada 2014, banyak berita bohong dan hoaks yang tersebar yang terkait pemilihan presiden dimana saat itu salah satu calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu kandidat yang paling sering menjadi korban berita bohong, misalnya Jokowi akan dibaptis dan mengganti nama menjadi Herbartus, Jokowi adalah keturunan PKI, beretnis Cina, dan menjadi kaki tangan asing (Komdigi, 2020; Nurita, 2018). Meskipun dinilai kurang banyak diterpa informasi palsu, kandidat presiden lainnya yaitu Prabowo Subianto juga menjadi korban hoaks seperti informasi bahwa Prabowo meminta kewarganegaraan pada tahun 1999 dan isu pemukulan yang dilakukan Prabowo pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2014 di Gedung KPU (Prihantoro, 2014). Selain itu, Prabowo mengalami serangan dengan sebuah video pendek yang menampilkan pernyataannya bahwa dia adalah produk asing. Meskipun isi video itu benar namun video berdurasi

47 detik tersebut hanyalah video pendek yang diedit sedemikian rupa dari video utuh berdurasi 2 menit 55 detik (Tempo, 2018).

Fenomena gangguan informasi (mis-disinformasi dan malinformasi) yang mencuat pada Pemilu 2014 menjadi peristiwa penting yang menandai pergeseran atau perubahan pola penyebaran gangguan informasi dari penyebaran konvensional menjadi penyebaran ke ranah digital yang semakin masif dan instan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Youtube menjadi media sosial utama dalam penyebaran berbagai berita bohong disamping munculnya portal-portal berita berbasis internet yang memberikan peluang bagi siapapun untuk memproduksi, mereproduksi, serta mendistribusikan berbagai informasi palsu. Platform-platform ini kemudian memberikan aksesibilitas penggunaanya untuk menyebarkan pesan dengan berbagai bentuk mulai dari teks, gambar, hingga video yang dirancang sedemikian rupa untuk memancing emosi dan memperkuat bias politik masyarakat.

Pada 2014, banyak aktor yang terlibat dalam penyebaran hoaks mulai dari individu simpatisan partai politik, simpatisan pendukung kandidat politik, kelompok komunitas tertutup, para pendengung (buzzer) politik, operator media alternatif hingga tim sukses bayangan yang bekerja secara terorganisir di balik layar. Juditha, 2019 mencatat adanya operasi digital yang sistematis dan terstruktur dimana para pembuat konten dengan para pendengung (buzzer) dan pasukan digital (digital troops) (meliputi akun anonim dan bot) saling melakukan koordinasi dalam menyebarkan narasi-narasi tertentu yang mendukung atau menyerang kandidat politik (Juditha, 2019, p. 206). Pola distribusi konten hoaks dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan siklus menciptakan viralitas; hoaks disebar oleh akun sumber, diperkuat dan diperluas oleh buzzer dan digital troops, lalu dibagikan ulang oleh masyarakat umum yang cenderung mempercayai informasi tanpa proses verifikasi. Karakteristik media sosial yang sangat mengedepankan viralitas, strategi ini dinilai sangat efektif karena algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang banyak dibagikan dan mendapat interaksi, maka informasi palsu pun mendapat jangkauan luas dalam waktu singkat. Fenomena gangguan informasi pada 2014 menunjukkan bahwa gangguan informasi politik digital bukanlah sebuah fenomena organik semata, melainkan hasil dari strategi komunikasi politik yang menggunakan media sosial dan instrumen pendukung lainnya (buzzer dan digital troops) sebagai senjata utama. Pada Desember 2016, Kominfo merilis data yang menunjukkan bahwa ada 800.000 website yang digunakan untuk memproduksi berita palsu dan konten ujaran kebencian (Destavino et al., 2023, pp. 382–383).

Fenomena gangguan informasi kembali menjadi isu besar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 terutama Pilkada di Provinsi DKI Jakarta. Pilkada Jakarta menjadi salah satu kontestasi politik paling intens dan penuh polarisasi di Indonesia yang menyebabkan DKI Jakarta menjadi kota paling intoleran di Indonesia (Afrimadona, 2021; Perkasa, 2023). Pertarungan antar pasangan calon menjadikan ruang digital kembali menjadi arena pertarungan berbagai wacana yang melibatkan berbagai strategi yang terstruktur termasuk penggunaan mis-disinformasi dan malinformasi. Selama periode ini, lebih dari 100 hoaks dan berita bohong beredar secara masif di berbagai platform media sosial terutama Facebook dan Twitter. Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) hoaks yang tersebar menjelang Pilkada Jakarta memiliki isu yang beragam mulai dari isu rasial, agama, hingga fitnah terhadap dua kandidat calon Gubernur yaitu Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gangguan informasi yang tersebar pada pilkada Jakarta 2017 diantaranya adalah adanya temuan money politic yang dilakukan oleh paslon no.2, situs resmi KPU diserang dan diretas oleh hacker dari China, dan yang fenomenal adalah penyebaran potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Seribu yang menyesatkan, yang kemudian menjadi trigger polarisasi politik yang sangat tajam yang mengubah arah kontestasi politik sampai hari ini.

Ada begitu banyak aktor yang terlibat dalam penyebaran gangguan informasi pada Pilkada Jakarta 2017, mulai dari para partisan/simpatian, kelompok ormas, hingga tokoh agama dan politik yang memiliki kepentingan elektoral. Akun-akun grup komunitas dan akun-akun media sosial anonim menjadi sarana utama penyebaran hoaks, baik dengan tujuan menjatuhkan lawan politik, institusi penyelenggara pilkada, maupun untuk memobilisasi dukungan berbasis identitas. Dengan mengandalkan algoritma media sosial yang memperkuat echo chamber, filter bubble, dan mempermudah penyebaran konten hoaks secara viral, media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Youtube dijadikan sebagai kanal utama dalam penyebaran mis-disinformasi dan malinformasi seputar politik Pilkada 2017. Selain itu, kehadiran pendengung (buzzer) dan pasukan digital/siber (digital/cyber troops) dalam memperluas sebaran berbagai berita palsu, memperlihatkan bagaimana penyebaran informasi politik mulai dikendalikan secara sistematis oleh tim sukses maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Gangguan informasi politik yang masif pada Pilkada 2017 telah membentuk ketegangan yang tidak lagi berbasis pada program kerja atau visi misi, tetapi lebih berfokus pada persepsi masyarakat mengenai individu kandidat politik. Dampak dari eskalasi gangguan informasi pada 2017 semakin kuat hingga Pemilu 2019 dimana pola polarisasi yang terbentuk pada Pilkada 2017 ditambah dengan residu dari kontestasi Pemilu sebelumnya yang belum tuntas dan masih meninggalkan fraksi dan friksi di tengah masyarakat (Monggilo, 2023, p. 36).

Gangguan informasi pada pemilu 2019 ditandai dengan lahirnya ekosistem digital yang sangat mengkhawatirkan dimana ruang-ruang publik virtual dipenuhi oleh konten-konten kampanye hitam, ujaran kebencian, dan hoaks visual – termasuk video deepfake dan manipulasi foto. Hal ini merupakan keberlanjutan dan eskalasi dari pola yang telah terbentuk sejak pemilu 2014 dan Pilkada 2019 di Jakarta. Kedua momentum ini telah membentuk infrastruktur sosial, teknologi, dan psikologis yang mendorong penyebaran gangguan informasi yang lebih sistematis dan terkoordinasi. Menurut hasil survei Wabah Hoax Nasional yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa informasi politik, sosial, dan kebencian berbasis SARA masih menjadi konten hoaks yang paling banyak tersebar pada 2019. Hoaks berisi isu politik yang menjadi hoaks paling banyak tersebar, meningkat dari 91,8% menjadi 93,2% sedangkan hoaks isu SARA menurun dari 88,6% menjadi 76,2% (Mastel, 2019).

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa pada pemilu 2019 ada 128 hoaks terkait pemilu dimana penyebarannya terjadi pada pra-pemilu (34 hoaks) dan pasca-pemilu (94 hoaks) sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat bahwa selama 2019 terdapat 922 sebaran hoaks terkait Pemilu 2019 dan 47 sebaran hoaks selama Pilkada Serentak pada 2020 (Saptoyo & Galih, 2022b). Mafindo menemukan bahwa hoaks pada Pemilu 2019 lebih banyak mengangkat soal dukungan atau penolakan terhadap kandidat politik disamping isu-isu lain seperti upaya pembunuhan karakter kandidat dan mendelegitimasi proses dan hasil pemilu. Pada tahapan pra-pemilu, berbagai gangguan informasi disebarkan untuk mempengaruhi perolehan suara dimana kandidat politik dan para pendukungnya paling banyak menjadi sasaran hoaks. Dari 128 hoaks yang tersebar, 5,5% menyasar kandidat politik dan 7% menyasar ke para simpatian. Pada pasca-pemilu serangan terhadap para kandidat dan simpatian meningkat dari 5,5% menjadi 14,1% dan 7% meningkat menjadi 20,3%. Selain itu, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengalami serangan hoaks sebesar 4,7% sebelum pemilihan, meningkat signifikan menjadi 10,9% pasca pemungutan suara. Jika dilihat pada Tabel 1, dapat dikatakan bahwa pada tahapan pra-pemilu 2019, penyebaran gangguan informasi (hoaks) bertujuan untuk mempengaruhi perolehan suara dimana konten-konten yang disebarkan lebih banyak menyerang kandidat dan para simpatian, sedangkan pasca-Pemilu, hoaks yang disebarkan bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap kerja

penyelenggaraan Pemilu yang berujung kepada ketidakpercayaan publik terhadap hasil penghitungan suara (Purnama et al., 2023). Mahsun dan Mufrikhah (2019) menemukan bahwa ada 6 klasifikasi isu terkait sebaran informasi palsu terkait penyelenggaraan elektoral baik nasional maupun lokal 2019 yaitu hoaks terkait rekayasa kecurangan KPU (5 konten hoaks), sistem server KPU yang lemah (3 konten hoaks), distribusi logistik surat suara (7 konten hoaks), pengaturan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (5 konten hoaks), proses pencoblosan yang dilakukan KPU (7 konten hoaks), ancaman pada komisioner dan tuduhan ketidaknetralan KPU (8 konten hoaks) (Mahsun & Mufrikhah, 2019, pp. 63–124).

Tabel 2. Target Serangan Hoaks Pemilu 2019

Kategori Target Serangan	Pra-Pemilu		Pasca Pemilu		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pendukung Kandidat	9	7,0%	25	20,3%	35	27,3%
Kandidat	7	6,5%	18	14,1%	25	19,5%
KPU	6	4,7%	14	10,9%	20	15,6
Polisi	3	2,3%	12	9,4%	15	11,7%
Pemerintah Pusat	2	1,6%	7	5,5%	9	7,0%
Lembaga Survei	5	3,9	1	0,8%	6	4,7%
Campuran	0	0%	6	4,7%	6	4,7%
Pihak Asing	0	0%	4	3,1%	4	3,1%
TNI	0	0%	2	1,6%	2	1,6%
Mahkamah Konstitusi	0	0%	1	0,8%	1	0,8%
Pemerintahan Daerah	0	0%	1	0,8%	1	0,8%
Lain-lain	2	1,6%	2	1,6%	4	3,1%

Sumber: Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo)

Menurut beberapa penelitian, penyebaran gangguan informasi (mis-disinformasi dan malinformasi) pada Pemilu 2019 didorong oleh berbagai motif yaitu pertama, motif ekonomi dimana konten hoaks diproduksi dan disebar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial baik dari pemesanan pihak yang memberikan imbalan maupun dari iklan yang diberikan Google Adsense karena tingginya *traffic* (*views*, *comment*, *like*, dan *share*). Kedua, motif politik kekuasaan merupakan motif dimana produksi dan penyebaran hoaks dilakukan untuk menyukseskan agenda politik baik untuk menyerang dan menjatuhkan popularitas lawan politik maupun meningkatkan popularitas kandidat yang didukung. Ketiga, motif ideologi merupakan motif dimana hoaks diproduksi dan disebar karena didorong oleh keinginan untuk mengkonter pandangan atau ideologi dari kelompok lain yang berbeda dengan pandangan individu. Isu SARA, radikalisme, dan komunisme merupakan isu yang sering dijadikan komoditi untuk memproduksi konten hoaks pada motif ini. Keempat, Motif psikologi merupakan motif yang berdasarkan pada sikap seseorang terhadap kandidat atau kelompok lain seperti rasa benci. Polarisasi Masyarakat yang terbentuk sejak Pilpres 2014 dan semakin mengeras pada Pilkada 2014 dan Pilpres 2019 melahirkan kebencian yang berujung pada friksi politik dalam masyarakat. Hal inilah yang mendorong banyak orang menyebarkan berita-berita palsu. Kelima, motif sosial dimana produksi dan penyebaran hoaks didorong oleh keinginan seseorang mendapatkan atensi atau eksistensi (media) sosial. Para penyebar hoaks merasa dengan menyebarkan berita palsu mereka dinilai menjadi orang yang lebih maju (*up to date*) dan kaya informasi dan mereka terhubung dengan komunitas atau *group* yang memiliki kesamaan pandangan baik secara daring maupun luring. Keenam, adalah motif kesenangan dan mengisi waktu luang. Para pelaku menyebarkan hoaks hanya untuk mengisi waktu luang atau mencari kesenangan sesaat ketika melihat konten yang ia bagikan mendapat atensi dan respon yang banyak dari para pengguna

lainnya (Heryanto et al., 2024; Juditha, 2018; Khalyubi & Perdana, 2021; Mahsun & Mufrikhah, 2019; Rahayu et al., 2019; Safitri et al., 2022).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) menyatakan bahwa penyebaran berbagai gangguan informasi yang semakin masif menjelang Pemilu 2019 sebagian diproduksi secara sistematis dan terorganisasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggambarkan ada tiga fase bagaimana gangguan informasi diproduksi dan disebar. Pertama, kreasi pesan: pada fase ini para kreator atau pembuat konten merancang dan mendesain informasi palsu/hoaks terkait pasangan calon presiden. Kedua, fase produksi, dimana konten hoaks dibuat dalam berbagai medium mulai dari online, visual, dan lain-lain. Fase ketiga yaitu distribusi. Pada fase ini konten hoaks disebar ke media sosial jaringan relawan dan pendengung (*buzzer*) seperti Facebook dan Twitter. Para relawan, pendengung, dan pasukan siber (*cyber troops*) kemudian menyebarkan ke jejaringan yang mereka miliki yang kemudian menciptakan viralitas. Ketika konten hoaks sudah tersebar luas dan menjadi viral, produsen hoaks pertama kali kemudian menghapus akun sosial media mereka yang mereka gunakan untuk menyebarkan berita palsu pertama kali (Wedhaswary, 2023b, p. 52).

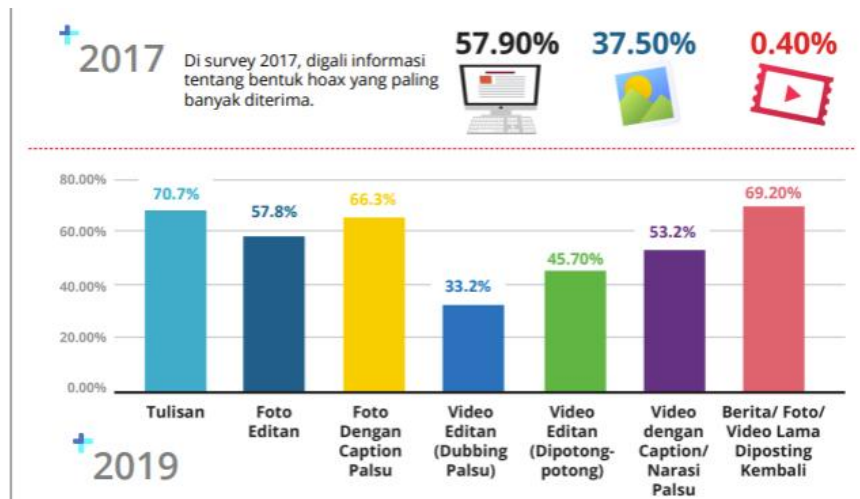


Sumber: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2023

Gambar 1. Pola Penyebaran Hoaks Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) menyatakan bahwa penyebaran berbagai gangguan informasi yang semakin masif menjelang Pemilu 2019 sebagian diproduksi secara sistematis dan terorganisasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggambarkan ada tiga fase bagaimana gangguan informasi diproduksi dan disebar. Pertama, kreasi pesan: pada fase ini para kreator atau pembuat konten merancang dan mendesain informasi palsu/hoaks terkait pasangan calon presiden. Kedua, fase produksi, dimana konten hoaks dibuat dalam berbagai medium mulai dari online, visual, dan lain-lain. Fase ketiga yaitu distribusi. Pada fase ini konten hoaks disebar ke media sosial jaringan relawan dan pendengung (*buzzer*) seperti Facebook dan Twitter. Para relawan, pendengung, dan pasukan siber (*cyber troops*) kemudian menyebarkan ke jejaringan yang mereka miliki yang kemudian menciptakan viralitas. Ketika konten hoaks sudah tersebar luas dan menjadi viral, produsen hoaks pertama kali kemudian menghapus akun sosial media mereka yang mereka gunakan untuk menyebarkan berita palsu pertama kali (Wedhaswary, 2023b, p. 52).

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mencatat bahwa bentuk konten hoaks pemilu khususnya Pemilu 2019 mengalami perkembangan mulai dari bentuk yang sederhana menjadi lebih beragam. Pada 2017 bentuk hoaks yang paling sering diterima adalah dalam bentuk tulisan, gambar, dan video. Namun pada 2019, konten gangguan informasi yang tersebar semakin beragam bentuknya dimana pada 2019 muncul konten konten berbentuk video editan yang menampilkan *dubbing* palsu, kemudian video editan yang dipotong potong sehingga menghilangkan konteks utuh dari sebuah informasi (mal-informasi), dan berita/foto/berita lama yang diposting kembali dan diberikan *caption* atau narasi palsu (Mastel, 2017, 2019).

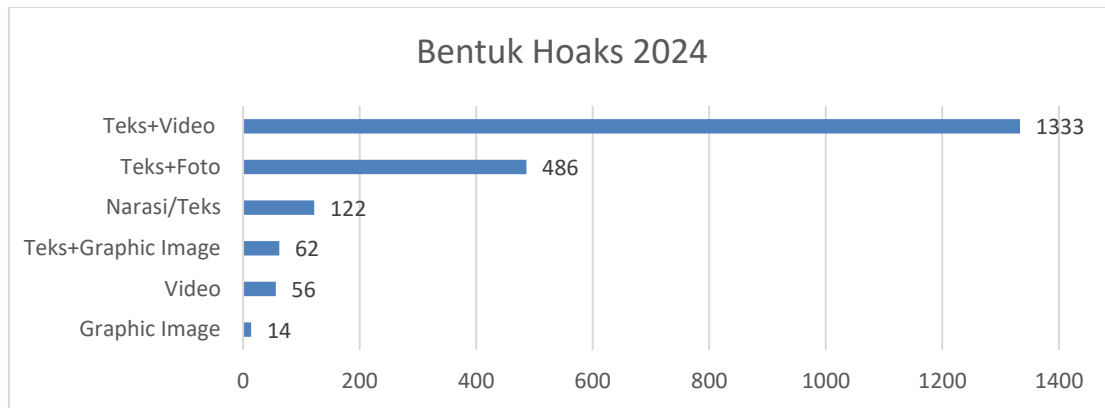


Sumber: Survei Mastel 2019

Gambar 2. Model dan bentuk hoaks pemilu 2017 & 2019

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, fenomena gangguan informasi politik pada Pemilu 2024 menunjukkan eskalasi di berbagai lini mulai dari intensitas, teknologi, dan skala distribusinya jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di samping semakin berevolusinya konten gangguan informasi dalam momentum Pemilu 2024 dimana banyak ditemukan dalam suatu propaganda politik, para aktor politik menyelipkan konten bernada positif yang jauh dari unsur kebenaran (Afrida, 2024) Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat dalam semester pertama tahun 2024 Mafindo menemukan ada sebanyak 2.119 konten hoaks yang tersebar di Indonesia dimana 1037(48,9%) kontennya merupakan konten hoaks politik. Temuan ini hampir mendekati total temuan sepanjang tahun 2023 (sebanyak 1292 hoaks) dan dua kali lipat dibandingkan pada Pemilu 2019 (644 hoaks) (Imam et al., 2025; Nugroho, 2024). Menurut anggota Presidium Komite Litbang Mafindo, Loina Perangin-angin, peningkatan ini kemungkinan besar dipicu oleh momentum politik seputar Pilpres dan Pilkada 2024 (Mafindo, 2024a). Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024 ada sekitar 274 isu hoaks terkait Pemilu 2024 dengan jumlah sebaran sebanyak 3235 hoaks (Sari, 2024).

Menurut laporan yang dilakukan oleh Mafindo mengenai lanskap hoaks 2024, ada 5 besar saluran atau media penyebaran gangguan informasi selama semester pertama 2024 yaitu Facebook (30,4%), Youtube (21,8%), TikTok (16,9%), Twitter (15,2%), dan WhatsApp (7,4%). Berbeda dengan konten hoaks pada saat Pemilu sebelumnya yang lebih banyak berbasis tulisan dan foto/gambar, pada Pemilu 2024, banyak konten hoaks yang tersebar merupakan konten berbasis video dan teks (Juditha & Darmawan, 2024). Dominasi dan banyaknya migrasi pengguna media sosial (khususnya kalangan muda) ke platform media sosial berbasis video seperti TikTok dan Youtube menjadikan media sosial ini dimanfaatkan sebagai ruang baru untuk menyebarkan hoaks dalam format video pendek yang emosional dan mudah viral (Mafindo, 2024b). Konten hoaks dalam format teks dan video menjadi konten yang paling banyak pada 2024 (1333 hoaks) disusul oleh teks dan foto (486 hoaks), narasi/teks (122 hoaks), dan teks dan gambar grafis (62 hoaks) sehingga dapat dikatakan bahwa dominasi teks dan dukungan visual (gambar dan video) secara signifikan memperkuat pesan hoaks, mendukung narasi teks, dan meningkatkan daya Tarik serta kredibilitasnya sehingga membuat konten-konten tersebut lebih mudah menyebar dan diterima oleh masyarakat.



Sumber: Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo)

Gambar 3. Bentuk Hoaks Pemilu 2024

Selain itu, penggunaan teknologi Artificial Intelligent (AI) dalam memproduksi konten gangguan informasi banyak terjadi pada Pemilu 2024. Konten video deepfake pidato Presiden Jokowi berbahasa Mandarin dan Pidato Anies Baswedan berbahasa Arab, konten voice cloning Anies Baswedan dengan Surya Paloh pasca debat Capres, hingga konten fabrikasi mantan presiden Soeharto yang mempromosikan Partai Golkar dan gambar pasangan Gemoy (Prabowo & Gibran), merupakan beberapa konten manipulasi berbasis AI yang meramalkan kontestasi Pemilu 2024 (Fernandes et al., 2024; Mafindo, 2024c). Survei yang dilakukan oleh Safer Internet Lab menemukan bahwa sebanyak 75,1% dari 1200 responden menyatakan bahwa selama Pemilu 2024 mereka telah melihat foto Prabowo-Gibran yang dibuat menggunakan AI dan 22,4% menyatakan membagikannya (share) ke orang lain. 22,4% responden melihat video deepfake pidato Anies Baswedan berbahasa Arab dan 4,1% nya menyatakan membagikan konten tersebut. Sementara 11,8% responden menyatakan melihat konten fabrikasi promosi Partai Golkar oleh mantan Presiden Soeharto dan 4,3%nya mengatakan membagikan konten tersebut (Fernandes et al., 2024, pp. 23–24).

Adapun sasaran gangguan informasi pada Pemilu 2024 lebih banyak menasar ke kandidat politik, disusul oleh pemerintah pusat, dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Survei oleh Mafindo menemukan bahwa hoaks yang menyerang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ada yang bernada positif atau tipe *pipe dream* (melebih-lebihkan kandidat, digunakan untuk membangun citra positif kandidat), dan sebagian bernada negatif atau tipe *wedge driver* (berupaya menjatuhkan lawan politik dan merusak reputasi kandidat dan penyelenggara pemilu). Sepanjang tahun 2023, Anies Baswedan menjadi kandidat politik yang paling banyak menjadi objek konten hoaks bernada positif disusul oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan Gibran Rakabumi, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto lebih sering menjadi sasaran hoaks bernada negatif. Pada semester pertama tahun 2024, Anies Baswedan masih menjadi sasaran hoaks bernada positif menjelang Pemilu 2024 disusul oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan sasaran hoaks bernada negatif lebih banyak diterima oleh Prabowo Subianto disusul Gibran Rakabumi dan Anies Baswedan (Mafindo, 2024b, pp. 25–30, 2024c).

Tabel 3. Target Konten Hoaks Politik Tahun 2023& 2024

2023		Tone	
Kandidat		Positif	Negatif
1. Anies Baswedan		206	116
2. Ganjar Pranowo		63	73
3. Prabowo Subianto		28	66
4. Muhaimin Iskandar		17	5
5. Mahfud MD		44	5
6. Gibran Rakabumi		12	74
2024 (Semester I)		Tone	
Kandidat		Positif	Negatif
1. Anies Baswedan		107	46
2. Ganjar Pranowo		25	10
3. Prabowo Subianto		50	149
4. Muhaimin Iskandar		25	7
5. Mahfud MD		18	6
6. Gibran Rakabumi		22	106

Sumber: Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo)

Dibandingkan Pemilu sebelumnya, para aktor penyebar gangguan informasi politik pada 2024 semakin kompleks dan dinamis yang melibatkan kombinasi antara pendengung (buzzer) professional, tokoh digital, akun bot otomatis dimana Data Binokular menemukan bahwa ada peningkatan aktivitas buzzer sejak awal tahun 2023 (Imani, 2024), hingga pembuat konten bayaran yang menyamarkan disinformasi sebagai opini pribadi atau humor (Juditha & Darmawan, 2024, p. 178; Sanita, 2024). Selain itu, penyebaran gangguan informasi tidak hanya dilakukan oleh tim kampanye atau para partisan namun juga dilakukan oleh pihak ketiga seperti agensi digital marketing politik, kelompok atau komunitas ideologis online, serta kelompok diaspora digital (Assyahida, 2025; Efrianti, 2025; Juditha & Darmawan, 2024, p. 180).

Dari hasil yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir dinamika gangguan informasi politik di Indonesia mengalami eskalasi dan transformasi yang jelas baik dari segi intensitas, pola penyebaran, kompleksitas aktor, hingga media yang digunakan. Penyebaran hoaks atau berita palsu yang awalnya didominasi oleh teks dan gambar kemudian berkembang menjadi konten digital yang lebih kompleks, dengan berbagai format media (seperti format video pendek dan kombinasi teks+video), dan semakin memanfaatkan kemampuan yang rumit termasuk teknologi generative berbasis Artificial Intelligence (AI). Adapun platform media sosial yang paling menonjol dalam penyebaran gangguan informasi politik di Indonesia selama satu dekade adalah Facebook diikuti oleh Youtube, WhatsApp, Twitter, dan yang terbaru adalah platform TikTok. Ada pergeseran platform penyebaran yang disebabkan oleh migrasi para penggunanya terutama kalangan anak muda yang lebih menyukai platform berbasis video, yang menyebabkan konten hoaks semakin masif disebarkan dan sulit diverifikasi. Selain daripada itu, perubahan format itu bukan sekadar perubahan medium namun perubahan cara mempersuasi publik karena konten hoaks berbasis audio visual lebih meyakinkan dibandingkan teks maupun visual.

Adapun para aktor penyebar berita palsu atau hoaks terkait politik, sejak satu dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ekosistem penyebaran menjadi lebih beragam dimana pada 2014, para aktor penyebar lebih banyak dilakukan oleh simpatisan partai dan relawan, yang kemudian berkembang dengan munculnya pendengung (buzzer) professional, agensi marketing politik, hingga pembuat konten berbayar. Praktik produksi konten hoaks yang kemudian diamplifikasi oleh jaringan pasukan digital (digital troops) menandakan bahwa pola penyebaran hoaks dilakukan semakin sistematis dan terkoordinasi.

Ada berbagai motif yang mendasari kelompok atau individu melakukan penyebaran berita palsu diantaranya adalah motif ekonomi (didorong oleh monetisasi konten atau jasa berbayar), motif politik (didorong oleh preferensi pemilih dan menjatuhkan lawan), motif ideologis (memperkuat ideologi dan mencounter narasi lawan), motif psikologis (ekspresi kebencian), motif sosial (mencari atensi dan pengakuan dalam komunitas), serta motif hiburan.

3.2. Strategi-Strategi Penanganan Gangguan Informasi Politik Indonesia

Secara global, penanganan gangguan informasi politik telah menjadi perhatian serius di berbagai negara terutama menjelang dan paska peristiwa politik penting seperti Pemilu. Ada berbagai strategi yang dilakukan seperti penegakan regulasi yang mengatur media sosial dan penyedia layanan komunikasi dalam menangani hoaks, pendekatan literasi media atau digital publik yang menekankan pada peningkatan ketahanan Masyarakat terhadap berbagai konten palsu atau ujaran kebencian, hingga strategi penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi serta membatasi peredaran disinformasi.

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa strategi yang telah dan sedang dilakukan dalam menangani gangguan informasi politik seperti peningkatan literasi digital dan media serta edukasi publik terkait gangguan informasi, penggunaan berbagai teknologi seperti platform pengecekan fakta, verifikasi berbasis AI dan deteksi bot, hingga penguatan regulasi serta dorongan untuk melakukan kerja kolaboratif antara pemerintah, media, perusahaan teknologi komunikasi informasi, dan masyarakat sipil.

Pada strategi peningkatan literasi digital dan media, beberapa penelitian mengatakan bahwa strategi peningkatan literasi media dan digital merupakan strategi yang sangat efisien di tengah derasnya sebaran gangguan informasi politik. Literasi digital dan media bukan sekadar keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat, melainkan kemampuan seseorang mengakses informasi kemudian berpikir kritis dalam memahami, menganalisis, memverifikasi, bahkan mengkritik sebuah kebenaran informasi (Susilo et al., 2020). Hendrawan, dkk (2025) mencatat bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah pertama untuk menangani mis-disinformasi dimana literasi digital memungkinkan seseorang untuk mengenali tanda-tanda mis-disinformasi dan malinformasi seperti sumber yang tidak kredibel dan judul yang sensasional (Hendrawan et al., 2025, p. 1929). Literasi digital tidak hanya mencakup aspek teknis seperti kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital namun juga kecakapan untuk menilai informasi secara akurat, menghindari misinformasi, dan berbagi informasi secara etis (Putra & Ayyaisy, 2025; Ruslan, 2022). Beberapa studi telah mengupayakan berbagai strategi bagaimana peningkatan literasi media dan digital masyarakat terutama menghadapi gangguan informasi politik menjelang pemilihan mulai dari penyuluhan atau workshop literasi digital dan media (Mupida, 2025), lokakarya yang melibatkan para stakeholder (Simbolon et al., 2024) hingga penggunaan berbagai media kreatif seperti komik digital (Nina et al., 2024), serial drama berbasis website (Astuti et al., 2020), hingga penggunaan infografis guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama Pemilu (Palupi, 2019).

Pada implementasi penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi, ada berbagai strategi yang digunakan dalam menangani gangguan informasi seperti pemanfaatan platform digital untuk melakukan cek fakta atau memverifikasi berita melalui aplikasi dan platform digital seperti Google Fact Check Tools, hoax buster tools, dan alat verifikasi berbasis AI oleh organisasi seperti Mafindo dan Cekfakta.com (Luthfia et al., 2025) dan pengecek fakta yang dimiliki oleh media-media massa seperti cekfakta.kompas.com, Liputan6, Tempo, dan lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki mesin pendeteksi otomatis yang disebut Automatic

Identification System (AIS) untuk memantau dan melacak berbagai konten dan media yang menyebarkan hoaks (Iskandar et al., 2024, p. 459).

Strategi lain dalam penanganan gangguan informasi adalah penerapan regulasi dan aturan hukum dalam penanganan gangguan informasi politik guna menjaga integritas demokrasi. Regulasi ini mencakup pengawasan terhadap penyebaran konten digital oleh lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Pengawas Pemilu, yang bekerja sama dengan platform media sosial dan lembaga pemeriksa fakta. Penetapan aturan hukum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melindungi aktivitas internet dari ancaman kejahatan siber dan mengatur ruang digital terkait larangan ujaran kebencian, hoaks, dan penyebaran informasi bermuatan SARA (Budiman, 2024). Selain itu, pihak kepolisian juga mengeluarkan surat edaran khusus (SE) yang memberikan ancaman terhadap pelaku penyebar kebencian (Anggraeni & Andrinoviarini, 2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur mengenai penggunaan media sosial sebagai alat kampanye yang terdaftar juga meminimalisir penyalahgunaan platform digital (Nurdin, 2024).

Strategi yang tampaknya sangat krusial dalam penanganan gangguan informasi politik di Indonesia adalah terbangunnya kolaborasi lintas lembaga pemerintahan, penegak hukum, masyarakat sipil, media massa (konvensional dan online), dan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa studi menemukan bahwa upaya dari kolaborasi-kolaborasi lintas sektor ini efektif dalam deteksi dini dan respon cepat dalam menangani berbagai gangguan informasi politik seperti Simbolon dkk., 2024, yang mencatat bahwa kolaborasi yang terkoordinasi antarlembaga pemerintah seperti Dinas Kominfo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum merupakan kunci penanganan hoaks politik dimana strategi yang dihasilkan dari kerja kolaboratif ini melibatkan deteksi dini, respon cepat terhadap hoaks, dan kampanye edukasi literasi digital. Strategi ini dinilai berhasil dalam memitigasi dampak negatif hoaks terhadap proses demokrasi. Kemudian Kurniyanto dkk., 2025 menemukan bahwa Kepolisian Indonesia melalui Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) melakukan kerja kolaborasi lintas sektor dan teknologi intelijen dalam mencegah hoaks dan disinformasi melalui pemantauan intelijen digital, pemetaan indeks kerentanan daerah, dan edukasi literasi kepada masyarakat. Selain daripada itu, kolaborasi juga dilakukan oleh masyarakat media melalui kolaborasi tim pemeriksa fakta dari beberapa elemen komunitas media seperti Asosiasi Media Online Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dan 24 media online arus utama di Indonesia. Kolaborasi Cek Fakta ini melakukan pemantauan arus informasi, data dan fakta terutama proses Pemilu guna melindungi masyarakat dari informasi sesat, klaim palsu ataupun pernyataan yang menyesatkan (Hapsari, 2020).

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa penanganan gangguan informasi politik di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan peningkatan literasi digital dan media serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis AI, penguatan regulasi dan undang-undang, serta kolaborasi lintas sektor. Literasi digital dan media terbukti menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, karena tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan etika berbagi konten. Upaya edukasi melalui workshop, kampanye kreatif, dan media alternatif menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran publik, khususnya menjelang kontestasi politik. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti platform cek fakta, sistem verifikasi berbasis AI, deteksi bot, dan pemantauan otomatis konten digital oleh pemerintah dan media massa memperkuat kapasitas

deteksi dini dan respon cepat terhadap hoaks politik. Namun, efektivitas strategi teknologis ini sangat bergantung pada kerangka regulasi yang jelas dan implementatif, seperti UU ITE, regulasi pemilihan (misalnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)), serta kebijakan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan disinformasi politik. Temuan penting lainnya menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi, merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem penanganan gangguan informasi yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan model kolaboratif berbasis literasi, teknologi, dan regulasi yang terintegrasi sebagai strategi utama dalam menjaga integritas informasi politik dan kualitas demokrasi di era kecerdasan buatan (AI).

4. PENUTUP

Fenomena gangguan informasi (misinformasi, disinformasi, dan malinformasi) politik telah menjadi salah satu tantangan serius dalam kehidupan demokrasi di era digital yang memungkinkan penyebaran gangguan informasi secara cepat dan masif. Dengan melakukan berbagai kajian literatur dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa selama satu dekade terakhir gangguan informasi politik di Indonesia mengalami eskalasi yang signifikan, baik dari segi intensitas, kompleksitas, maupun teknologi yang digunakan. Sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2024, penyebaran gangguan informasi tidak hanya semakin masif, tetapi juga semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai konten berbasis audiovisual, teks, teknologi AI maupun gabungan dari ketiganya. Bentuk gangguan informasi pun semakin berkembang mulai dari sekadar teks dan gambar menjadi video manipulatif, *deep fake*, hingga peniruan suara (*voice cloning*) yang sangat persuasif dalam menyesatkan publik. Para aktor penyebarannya pun semakin berkembang dari para simpatisan biasa menjadi jejaringan yang kompleks meliputi pendengung (*buzzer*) profesional, pasukan digital (akun anonim dan bot), hingga pembuat konten berbayar yang menyamarkan disinformasi sebagai opini pribadi atau humor semata. Adapun motif penyebaran gangguan informasi politik didorong oleh berbagai motif mulai dari ekonomi, politik kekuasaan, ideologi, psikologis, sosial, hingga motif hiburan.

Untuk menanggulangi berbagai tantangan gangguan informasi politik, berbagai strategi telah diterapkan seperti peningkatan literasi media dan digital, pemanfaatan berbagai teknologi dan *platform* dalam memverifikasi informasi, penegakan regulasi melalui UU ITE dan Peraturan KPU, serta kerjasama kolaboratif lintas lembaga yang meliputi Komdigi, KPU, Bawaslu, Kepolisian, media, perusahaan teknologi, dan keterlibatan publik. Pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak secara simultan menjadi sangat penting dalam menangkal berbagai jenis gangguan informasi yang semakin sulit dikendalikan dan dikenali.

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam menangani gangguan informasi politik. Pertama, perlu dilakukan penguatan program literasi digital secara masif dan berkelanjutan terhadap semua kelompok usia baik muda ataupun tua agar tidak ada kesenjangan kemampuan dalam berpikir kritis dalam mengelola informasi di media sosial. Kedua, pemerintah bersama lembaga penyelenggara pemilu, media massa, platform digital serta organisasi kemasyarakatan sipil perlu meningkatkan kolaborasi dalam membangun sistem deteksi dini terhadap gangguan informasi politik. Ketiga, mendorong komitmen yang nyata dari platform media (khususnya media sosial) agar lebih proaktif dalam membatasi konten disinformasi dan bertanggung jawab atas karakteristik algoritma yang mereka gunakan. Keempat, memperluas kerjasama antar aktor lintas sektor yang meliputi media, komunitas atau organisasi sipil, dan para akademisi yang diharapkan mampu menjadi kekuatan kolektif dalam membangun ekosistem informasi yang sehat terutama di masa menjelang dan

selama proses demokrasi berlangsung. Terakhir, peneliti merokemendasikasikan kajian lebih lanjut mengenai dinamika aktor penyebar hoaks khususnya pihak ketiga seperti agensi digital dan para konsultan komunikasi politik yang dalam beberapa temuan tidak hanya mendesain dan menyebarkan disinformasi negatif, tetapi juga membungkus kampanye politik dalam narasi positif yang manipulatif. *Toxic positivity*, merupakan suatu strategi kampanye yang terlihat optimistik dan mampu menggugah emosional, namun menyembunyikan informasi substantif dan mengaburkan realitas. Dalam konteks ini, *toxic positivity* berpeluang menjadi bentuk gangguan informasi terselubung yang justru memperdaya publik melalui pesan-pesan yang dapat menghalangi publik untuk melakukan penilaian kritis terhadap para kandidat dan kampanye yang ditawarkan. Oleh karena itu, memahami praktik *toxic positivity* ini menjadi penting dalam upaya membangun literasi politik yang sehat di era akal imitasi (AI).

Ucapan Terimakasih

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) yang telah memberikan dukungan dana dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan semoga kedepannya hasil dari dana riset ini dapat direalisasikan dalam bentuk yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2024). *Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Pemilu 2024*. <https://aji.or.id/data/jurnalisme-cekfakta-melawan-disinformasi-pemilu-2024>
- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2). <https://doi.org/10.1177/18681034211007490>
- Anggraeni, D., & Andrinoviarini. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017). *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Assyahida, T. N. (2025). Disinformasi Pemilu Digital sebagai Ancaman Transnasional: Implikasi terhadap Kedaulatan Demokrasi Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 97–106.
- Astuti, S. I., Giri, L., & Hidayah, N. (2020). VIDEO WEB DRAMA SERIES FOR COMBATING DISINFORMATION AN INNOVATION IN REACHING AND TEACHING AUDIENCE. *ASPIRATION Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.56353/aspiration.v1i1.9>
- Budiman, A. (2024). Upaya pengawasan ruang digital dalam pilkada 2024. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, XVI(8), 1–5. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-8-II-P3DI-April-2024-181.pdf
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Delmana, L. P. (2023). STRATEGI PENANGANAN HOAKS PEMILU MELALUI PENERAPAN SMART CONTRACT LOGIC SERTA SISTEM DETEKSI HOAKS OTOMATIS. *Electoral Governance Journal: Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 188–211.
- Destavino, I., Habibi, M., & Syamsuri, M. R. (2023). Navigating Digital Deception: Unmasking Propaganda and Disinformation in the 2024 Elections. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4).
- Dickson, M. F. (2024). *Chapter 2 Disinformation in the United States: When Distrust Trumps Facts*. Instituteofgeoconomics.Org. <https://instituteofgeoconomics.org/en/research/2024112001-2/>
- Efrianti, Y. (2025). Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam pemberitaan Media Online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 3(1), 74–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>
- ELSAM. (2017). *Hoax, Berita Palsu dan Ancamannya Terhadap Kebebasan Sipil*. Elsam.or.Id. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/hoax-berita-palsu-dan-ancamannya-terhadap-kebebasan-sipil>
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 924–930. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58126/45400>

- Ferdinal, Y., & Astuti, P. (2023). TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT KONSUMEN TERKAIT REVIEW PRODUK DI MEDIA SOSIAL Yan. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(3), 86–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58126>
- Fernandes, A., Krisetya, B., & Yazid, E. K. (2024). *Mis/Disinformation Map in Indonesia: Trust Level and Its Impact on Democracy*. https://saferinternetlab.org/wp-content/uploads/2025/02/EN_Rilis-Survei-Publik-CSIS_SAIL_.pdf
- Galpaya, H., & Bandaranayake, R. (2022). *Tackling the information disorder in Asia*. Eastasiaforum.Org. <https://eastasiaforum.org/2022/07/02/tackling-the-information-disorder-in-asia/>
- Hapsari, D. T. (2020). INOVASI JURNALIS DARING DALAM KOLABORASI TIM CEK FAKTA SELAMA PEMBERITAAN PILPRES 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.51-63>
- Hendrawan, D. S., Dohamid, A. G., & Afifuddin, M. (2025). Strategi Menghadapi Disinformasi Dalam Konteks Perang Asimetris. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 1924–1933. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5286>
- Heryanto, G. G., Zamroni, M., & Astuti, Y. D. (2024). Disinformation Unveiled: Tracking Media Hoaxes to Build Public Literacy for Indonesia's 2024 Elections. *Studies in Media and Communication*, 12(4), 28–40. <https://doi.org/10.11114/smc.v12i4.6931>
- Imam, A. S. R., Hidayat, D. R., & Gumilar, G. (2025). Analisis Tipologi Disinformasi dalam Publikasi Cek Fakta Kompas.com Isu Pemilu 2024 Selama Masa Kampanye. *Common*, 9(1), 97–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/3v62r915>
- Imani, A. (2024). *Koalisi Cek Fakta: Sebagian Hoaks Berasal dari Buzzer*. Digitalmama.Com. https://digitalmama.id/2024/01/koalisi-cek-fakta-sebagian-hoaks-berasal-dari-buzzer/?utm_source=chatgpt.com
- Iskandar, D., Suratno, G., & Raharjo, D. H. (2024). Konstruksi Literasi Digital Pada Pemilu 2024 Untuk Membendung Arus Informasi Dan Berita Palsu. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 452–465. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i2.7338>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommass/article/view/1340/902>
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika, 2019*, 199–212.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2024). KOMUNIKASI POLITIK TERKAIT HOAKS PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024 POLITICAL COMMUNICATION RELATED TO HOAXES IN THE 2024. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 28(2), 167–182. <https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5682>
- Kaur, K., & Nair, S. S. (2018). *Information Disorder In Asia-India*. https://www.researchgate.net/publication/323921968_Information_Disorder_in_Asia_and_the_Pacific_Overview_of_Misinformation_Ecosystem_in_Australia_India_Indonesia_Japan_the_Philippines_Singapore_South_Korea_Taiwan_and_Vietnam
- Khalyubi, W., & Perdana, A. (2021). Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.17>
- Komdigi. (2020). *[Hoaks] Jokowi akan Dibaptis dan Mengganti Nama Menjadi Hebartus*. Komdigi.Go.Id. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-jokowi-akan-dibaptis-dan-mengganti-nama-menjadi-hebartus>
- Krisetya, B. (2025). *Should Indonesia adopt EU Digital Act to Improve its Content Moderation Policies*. Blog.Csis.or.Id. <https://blog.csis.or.id/should-indonesia-adopt-eu-digital-services-act-to-improve-its-content-moderation-policies-e2db6ee5f968>
- Kurniyanto, A. F., Handayani, R. S., & Nugrahani, H. S. D. (2025). The Strategic Role of The Police Baintelkam in Preventing Hoax and Disinformation in the 2024 Election. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 4(3), 472–480. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1802>
- Kwok, Y. (2018). *Information Disorder In Asia-Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/323921968_Information_Disorder_in_Asia_and_the_Pacific_Overview_of_Misinformation_Ecosystem_in_Australia_India_Indonesia_Japan_the_Philippines_Singapore_South_Korea_Taiwan_and_Vietnam
- Luthfia, A., Muslikhin, M., Prahassacitta, V., Wahyuningtyas, B. P., & Condrobimo, A. R. (2025). Debunking Technology and Efforts in Combating Dis/Misinformation. *Proceedings of the 2025 19th*

- International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, IMCOM 2025, January*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/IMCOM64595.2025.10857576>
- Mafindo. (2024a). *Hoaks Meningkatkan pada Pemilu 2024, Awas Berulang di Pilkada*. Mafindo.or.Id. <https://mafindo.or.id/2024/08/30/siaran-pers-hoaks-meningkat-pada-pemilu-2024-awas-berulang-di-pilkada/>
- Mafindo. (2024b). *Lanskap Hoaks 2024, Semester I*. <https://mafindo.or.id/publikasi-riset/publikasi/lanskap-hoaks-2024-semester-1/>
- Mafindo. (2024c). *Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Gangguan Demokrasi Indonesia*. Mafindo.or.Id. <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia/>
- Mahsun, M., & Mufrikhah, S. (2019). *Serangan Hoax Terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019: Studi di Jawa Tengah*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/27/8>
- Mastel. (2017). *Wabah Hoax Nasional 2017*.
- Mastel. (2019). *Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019*. <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>
- Monggilo, Z. M. Z. (2023). Selayang Pandang Pemilu Indonesia: Perubahan dan Tantangan. In I. N. Unggraini (Ed.), *Gangguan Informasi, Pemilu, dan Demokrasi: Panduan bagi Jurnalis dan Pemeriksa Fakta* (pp. 8–36). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. https://aji.or.id/system/files/2024-07/fix20layout20buku20gangguan20informasi2c20pemilu2c20dan20demokrasicompres_0.pdf
- Mupida, S. (2025). Pelatihan Akademi Digital Lansia Terhadap Penipuan dan Berita Hoax Melalui Kerjasama dengan Tular Nalar. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(1), 105–120. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/40809/18375>
- Nina, N., Triyanto, T., Adinigsih, Y., & Haryanto, Y. (2024). Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Menjelang Pemilihan Presiden 2024 Melalui Pengembangan Komik Digital: Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 6. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 22, 273–280. <https://doi.org/10.25170/kolita.22.5983>
- Nugroho, S. E. (2024). *Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Pemilu 2024*. <https://aji.or.id/data/jurnalisme-cekfakta-melawan-disinformasi-pemilu-2024>
- Nurdin, R. (2024). TROLLS , DISINFORMASI , DAN STRATEGI KAMPANYE : TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024. *Electoral Governance Journal: Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1), 1–26. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/1350/164/4619>
- Nurita, D. (2018). *La Nyalla, Obor Rakyat dan Isu Jokowi PKI*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/la-nyalla-obor-rakyat-dan-isu-jokowi-pki--789355>
- Palupi, P. K. (2019). *Pengaruh Infografis pada Akun Instagram @Tirtoid Terhadap Sikap Politik (Studi Pengaruh tentang Kebutuhan Informasi, Tampilan Infografis, dan Terpaan Media Mengenai Cek Fakta Pascadebat Pilpres 2019 pada Akun Instagram @tirtoid Terhadap Sikap Politik di K. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*.
- Parnell, T. (2023). BREXIT AND DISINFORMATION. In *The Routledge Handbook of Discourse and Disinformation*. <https://doi.org/10.4324/9781003224495-15>
- Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik Sosial berupa Politisasi Agama sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.36080/djk.2356>
- Prihantoro, A. (2014). Kubu Prabowo-Hatta Laporkan Kampanye Hitam ke Bawaslu. *Antaranews.Com*. <https://www.antaranews.com/berita/436047/kubu-prabowo-hatta-laporkan-kampanye-hitam-ke-bawaslu>
- Purnama, F. Y., Murfianti, F., Wahid, A., Wijayanto, Kurniawan, H., Shaleh, M. H., Perangin-angin, L. L. K., & Jannah, R. T. (2023). *Tipologi Hoaks Pilpres 2019* (N. Hidayah (ed.)). Bildung. <https://mafindo.or.id/publikasi-riset/riset/tipologi-hoaks-pilpres-2019/>
- Putra, D. H. A., & Ayyaisy, H. I. (2025). Optimizing Digital Technology in Progressive Islamic Education to Enhance Public Literacy and Combat Hoaxes. *Multicultural Islamic Education Review*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9915>
- Rahayu, W. H., Utari, P., & Wijaya, M. (2019). The Motivation of Hoax Message Recipients in the Process of Disseminating Hoax Information on Facebook Group. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 414. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.1015>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech

- pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rianissa, S. N. (2025). Disinformasi di Era Post-Truth : Ancaman terhadap Demokrasi dan Mobilitas Global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 37–46. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/659/943/3557>
- Ruslan, R. (2022). Critical Information Literacy in the Post-Truth Era: A Strategy for Facing Information Flow in Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 24(1). <https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i1.12325>
- Safitri, P. N., Astuti, S. I., Hidayah, N., Suryani, C., Wasdiana, M. D., & Wahid, A. (2022). When Politics and Religion Become Disaster: An Annual Mapping of Hoax in Indonesia. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v13i2.2104>
- Sanita, M. (2024). *Politik Semakin Hangat, Hoaks Meningkat. Mengapa Selalu Terjadi Jelang Pemilu*. Communication.Uii.Ac.Id. <https://communication.uui.ac.id/politik-semakin-hangat-hoaks-meningkat-mengapa-selalu-terjadi-jelang-pemilu/#:~:text=Komodifikasi dan pabrikasi hoaks tidak,kepentingan politiknya sendiri%2C%27%20pungkasnya.>
- Saptoyo, R. D. A., & Galih, B. (2022a). *Perbedaan Tren Hoaks pada Pemilu 2014 dan 2019*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/17/180800982/perbedaan-tren-hoaks-pada-pemilu-2014-dan-2019?page=all>
- Saptoyo, R. D. A., & Galih, B. (2022b). *Perbedaan Tren Hoaks pada Pemilu 2014 dan 2019*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/17/180800982/perbedaan-tren-hoaks-pada-pemilu-2014-dan-2019?page=all>
- Sari, N. (2024). *Menkominfo Ungkap Ribuan Hoaks Pemilu Dibuak oleh Para Buzzer*. Kompas.com. <https://www.youtube.com/watch?v=b0j8pk8Ds1s>
- Simbolon, A. B., Rubino, R., & Ritonga, E. Y. (2024). Hoax-Free Movement: The Role of Inter-Institutional Communication in Asahan in the 2024 Election. *Journal La Sociale*, 5(6), 1565–1575. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i6.1424>
- Son, G. H. W., & Rashid, E. I. A. (2021). *Classification of Information Disorder* (03/21). <https://www.krinstitute.org/assets/contentMS/img/template/editor/DP - Classification of Information Disorder v1.1b.pdf>
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2020). *Hoax as a Reflection on the Low Digital Literacy in Indonesia*. <https://doi.org/10.5220/0009100201650174>
- Tempo. (2018). *[Fakta atau Hoax] Benarkah Prabowo Subianto Mengatakan Saya Produk Asing?* Tempo.Co. <https://cekfakta.tempo.co/fakta/57/fakta-atau-hoax-benarkah-prabowo-subianto-mengatakan-saya-produk-asing>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2019). Mengulas “Kekacauan Informasi”: Bentuk Misinformasi, Disinformasi, dan Mal-Informasi. In K. Ambardi, N. Kurnia, Rahayu, & Z. M. Z. Monggilo (Eds.), *Jurnalisme, Berita Palsu, & Disinformasi* (pp. 51–64). United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022>
- Wedhaswary, I. D. (2023a). Mengenali Modus dan Anatomi Gangguan Informasi dalam Pemilu. In I. N. Unggraini (Ed.), *Gangguan Informasi, Pemilu, dan Demokrasi: Panduan bagi Jurnalis dan Pemeriksa Fakta*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. <https://aji.or.id/read/buku/127/gangguan-informasi-pemilu-dan-demokrasi-panduan-bagi-jurnalis-dan-pemeriksa-fakta.html>
- Wedhaswary, I. D. (2023b). Mengenali Modus dan Anatomi Gangguan Informasi dalam Pemilu. In I. N. Unggraini (Ed.), *Gangguan Informasi, Pemilu, dan Demokrasi: Panduan bagi Jurnalis dan Pemeriksa Fakta* (pp. 46–60). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. <https://aji.or.id/data/gangguan-informasi-pemilu-dan-demokrasi-panduan-bagi-jurnalis-dan-pemeriksa-fakta-0>